



Peran Pajak sebagai Instrumen Penyokong Pendidikan Inklusif untuk Meningkatkan *Human Development Index (HDI)* Indonesia: Sebuah Studi Literatur

Ilham Febri Budiman

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Alamat: Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222

Korespondensi penulis: ilhamfebribudiman@gmail.com

Abstract. Taxes are the largest source of revenue in the structure of Indonesia's state budget (APBN). The revenue will be allocated for state spending, one of which is on education. The education sector is a mandatory spending area amounting to 20% of the total state revenue. This paper aims to identify the role of taxes in supporting inclusive education to improve Indonesia's Human Development Index (HDI). The approach used in this research is qualitative with a literature study method using secondary data sources. The research results show that the increase and decrease in tax revenue affect the size of the education budget due to the dominant contribution of taxes to state revenue. HDI is influenced by indicators such as life expectancy, literacy rate, average years of schooling, and real per capita expenditure, all of which can be improved through inclusive education. Therefore, it can be concluded that if tax revenue increases, the education budget will also increase, and it will be able to fund inclusive education. Inclusive education will drive the increase in Indonesia's HDI. Some of the educational issues that occur include education that is not yet fully inclusive, the low quality of teachers, and the uneven distribution of school facilities and infrastructure. These problems can be resolved if there is significant educational funding, which is also influenced by tax revenue.

Keywords: Tax, Education, Inclusive, Budget

Abstrak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam postur APBN Indonesia. Hasil penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk belanja negara yang salah satunya pada pendidikan. Sektor pendidikan merupakan *mandatory spending* sebesar 20% dari total penerimaan negara. Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pajak dalam menyokong pendidikan inklusif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan metode studi literatur dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan penerimaan pajak berpengaruh pada besaran anggaran pendidikan karena kontribusi pajak yang dominan pada penerimaan negara. IPM dipengaruhi oleh indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang keempat indikator tersebut dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang inklusif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila penerimaan pajak meningkat maka anggaran pendidikan meningkat, dan akan dapat mendanai pendidikan yang inklusif. Pendidikan yang inklusif akan mendorong kenaikan IPM Indonesia. Beberapa masalah pendidikan yang terjadi antara lain pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif, kualitas guru yang masih rendah, dan sarana serta prasarana sekolah yang belum merata. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila dana pendidikan besar yang juga dipengaruhi oleh penerimaan pajak.

Kata kunci: Pajak, Pendidikan, Inklusif, Anggaran

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan yang memiliki kontribusi terbesar dibanding instrumen lainnya. Pada APBN edisi 2023, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp1.869,2 T atau sekitar 86% dari total penerimaan negara. Kontribusi pajak terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan target mencapai Rp2.309,9 T (Kemenkeu, 2024). Berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami bahwa optimasi pada penerimaan perpajakan

sangat krusial untuk keberlangsungan fiskal Indonesia. Namun selama dua tahun terakhir, penerimaan perpajakan selalu memenuhi target yang ditetapkan pada RAPBN.

Penerimaan negara kemudian digunakan untuk belanja keperluan negara. Dalam belanja negara terdapat sebuah kebijakan yang disebut mandatory spending. Mandatory spending adalah belanja negara pada sektor tertentu yang porsi/ persentasenya sudah di atur dalam Undang-Undang dari total penerimaan APBN. Salah satunya adalah mandatory spending Pendidikan sebesar 20% dari APBN yang merupakan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang berbunyi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang krusial bagi sebuah negara. Hal tersebut karena kualitas sumber daya manusia di suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya . Seperti diketahui bersama bahwa sumber daya manusia merupakan aset paling berharga suatu negara. Hal ini juga diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani pada (12/9/2021) bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (Ronald, 2021). Oleh karena itu, memasukkan pendidikan dalam salah satu mandatory spending merupakan kebijakan yang tepat.

Arah kebijakan pendidikan di Indonesia sendiri dalam hal ini wewenang Kemendikbud Ristek ialah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan arah kebijakan dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan. Pendidikan inklusif memberi kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan baik fisik, mental, maupun sosial (Kemendikbud Ristek, 2022). Pendidikan inklusif di Indonesia mengacu pada amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pendidikan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan *Human Development Index (HDI)* atau dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, untuk mewujudkannya perlu anggaran yang besar guna menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia seperti ketimpangan pendidikan di daerah 3T, kualitas sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar. Dengan segudang permasalahan yang ada, maka perpajakan dapat menjadi stimulus penyelesaian masalah. Dengan asumsi bahwa optimasi penerimaan

pajak akan meningkatkan penerimaan secara keseluruhan. Sehingga anggaran pendidikan akan naik karena adanya kebijakan mandatory spending.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut Sommerfelt, dkk pajak merupakan suatu pendapatan sektor swasta atau individu yang dialihkan ke sektor pemerintah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pengertian pajak menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022) kontribusi yang sifatnya wajib kepada negara yang terutang pada orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang sifatnya wajib dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa suatu imbalan berupa jasa secara langsung (Khoirunnisa & Kusuma, 2024).

Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan suatu sistem pendidikan yang mengakui setiap anak sebagai seorang pelajar dan menekankan bahwa sekolah reguler harus mampu mendidik semua siswa tanpa terkecuali dalam masyarakat tanpa memandang kondisi, keadaan, sosial, intelektual, emosional, linguistik, karakter dan perbedaan lainnya (Phytanza et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif mendorong pihak sekolah untuk dapat melakukan penyesuaian dalam kurikulum, sarana, prasarana, dan metode pembelajaran agar dapat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.

Human Development Index (HDI)

Human Development Index (HDI) atau yang biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi utama pembangunan manusia: umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah rata-rata geometris indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi (UNDP, 2023). IPM merupakan salah satu komponen penting untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara dari sisi pembangunan sumber daya manusia (Azfirmawarman et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini tidak menggunakan pengolahan angka atau statistik dan bertujuan untuk memahami kontak sosial dan fenomena sosial secara alami (Nasution, 2023). Sedangkan untuk metode penelitian

yang digunakan adalah studi pustaka, atau studi buku. Metode ini meneliti berbagai teori-teori dan berbagai jenis literatur yang terkait dengan subjek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013), data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui dokumentasi atau perantara dari pihak lain (Nurjanah, 2021). Data sekunder berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Penerimaan Pajak dengan Pendidikan Inklusif

Penerimaan pajak berhubungan dengan peningkatan IPM Indonesia. Pertama penerimaan pajak berpengaruh pada pendidikan dari segi anggaran. Semakin besar penerimaan pajak semakin besar pula anggaran pendidikan yang dialokasikan (*mandatory spending 20%*). Hal ini ditunjukkan oleh data berikut.

Tabel 1. Penerimaan Negara dan Anggaran Pendidikan

APBN Tahun	Penerimaan (dalam triliun)	Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Alokasi Pendidikan (dalam triliun)
2024	2.802,294	2.309,859	665,0
2023	2.463,024	2.021,223	612,2
2022	2.266,199	1.783,988	542,8
2021	1.743,648	1.444,541	550,0
2020	1.699,948	1.404,507	508,1

Sumber: (Kemenkeu, Portal Data)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa target penerimaan perpajakan pada postur APBN dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Efeknya alokasi dana pendidikan juga terus mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penerimaan pajak hanya berkontribusi 68% dari total penerimaan negara yang menyebabkan alokasi pendidikan tidak meningkat. Kausalitas dapat dianalisis yakni penerimaan pajak berkontribusi besar terhadap penerimaan negara sehingga peningkatannya akan meningkatkan penerimaan negara, kemudian besarnya penerimaan negara akan meningkatkan anggaran pendidikan karena adanya kebijakan 20% *mandatory spending*.

Apabila alokasi anggaran pendidikan tinggi, maka permasalahan pendidikan dapat sedikit demi sedikit diatasi. Karena pada dasarnya beberapa permasalahan dalam sektor pendidikan di Indonesia berhubungan dengan kurangnya anggaran dan dapat diselesaikan dengan anggaran yang besar. Oleh karena itu peningkatan penerimaan perpajakan diharapkan dapat mendorong jalannya program pendidikan inklusif yang berkeadilan dan

berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya output yang diberikan adalah peningkatan IPM Indonesia.

Pendidikan inklusif dapat berjalan dengan optimal apabila pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Inklusif dalam banyak hal mulai dari kesetaraan hak pendidikan antara anak normal dengan penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, hak anak dari keluarga tidak mampu untuk sekolah, hingga pemerataan fasilitas dan gaji guru yang layak.

Korelasi antara Pendidikan dengan Peningkatan *HDI* / IPM Indonesia

Human Development Index (HDI) atau dikenal juga dengan IPM ialah sebuah pengukuran secara agregat di suatu negara untuk mengetahui tingkat atau capaian pembangunan dalam bidang SDM berdasarkan beberapa instrumen kualitas hidup. Instrumen atau komponen yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran IPM berdasarkan BPS, antara lain:

- a. Angka Harapan Hidup
- b. Angka Melek Huruf
- c. Rata-rata Lama Sekolah
- d. Pengeluaran Riil per Kapita

Penulis memiliki hipotesis awal bahwa pendidikan memiliki hubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hipotesis ini sejalan dengan data bahwa instrumen dari IPM salah satunya adalah rata-rata lama sekolah (BPS, n.d.). Hipotesis ini kemudian didukung juga dengan indikasi adanya pengaruh tingkat pendidikan dengan kemiskinan. Seperti diketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu instrumen dari IPM. Penelitian dengan skala mikro di DKI Jakarta yang dilakukan oleh (Susanto & Pangesti, 2019) yang menyimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan. Hasilnya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang menyebabkan semakin tinggi kemiskinan dan berlaku sebaliknya. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendidikan menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan seperti pada penelitian oleh mahasiswa Polstat STIS (Firmansyah & Khairunnisa, 2023)

Instrumen selanjutnya dari pengukuran IPM adalah angka melek huruf. Angka melek huruf adalah kemampuan penduduk usia >15 tahun untuk membaca dan menulis huruf, baik latin maupun huruf lainnya. Berdasarkan data (BPS, 2023) angka melek huruf Indonesia tahun 2023 ialah 96,53% atau naik 0,18% dari tahun sebelumnya (yoy). Angka tersebut menjadikan Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara, tertinggal dari

Singapura dan Brunei DS. Angka melek huruf sejatinya berkorelasi langsung dengan pendidikan. Hal ini terjadi karena di Indonesia, pengajaran membaca dan menulis mayoritas didapatkan di pendidikan formal. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan disempurnakan di SD. Apabila terdapat 4% penduduk yang tidak melek huruf. Dapat diasumsikan bahwa mereka tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan dasar.

Instrumen yang paling signifikan ialah rata-rata lama sekolah. Rata-rata sekolah merupakan instrumen pengukuran IPM suatu negara (BPS, n.d.). Instrumen tersebut merupakan instrumen yang bertitik berat pada pendidikan sendiri. Dimana rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan rata-rata jenjang atau tingkat pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data (BPS, 2023) rata-rata lama sekolah Indonesia ialah 8,77 tahun pada 2023. Apabila secara awam dan *ceteris paribus*, angka tersebut menunjukkan tingkat pendidikan SLTP (SMP/MTs). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun umumnya karena terkendala biaya dan kurangnya sarana pendidikan (sekolah) khususnya di daerah 3T. Angka tersebut tergolong rendah karena pada level Asia Tenggara saja masih kalah dengan Singapura, Malaysia dan Filipina.

Instrumen terakhir adalah Pengeluaran Riil per Kapita. Pengeluaran Riil per Kapita ialah biaya konsumsi seorang penduduk secara agregat kemudian dibagi jumlah penduduk sesuai dengan paritas daya beli. Instrumen ini terkait dengan Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar kemungkinan seseorang mendapatkan penghasilan yang tinggi. Dengan penghasilan yang besar diasumsikan akan menambah konsumsi seseorang tersebut disamping dengan peningkatan *Saving*. Pengeluaran Riil per Kapita pada tahun 2023 sebesar 11,9 juta rupiah dengan tren meningkat 10 tahun terakhir walaupun masih terdapat fluktuasi.

Masalah Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Terlebih pula dalam APBN 2024 terdapat target IPM sebesar 73,99 –74,02 atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,49. Target tersebut termasuk kategori tinggi yakni ($70 \geq \text{IPM} \leq 80$) namun masih belum mencapai level sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$) seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand pada level Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk mencapai level negara tersebut perlu adanya peningkatan sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendidikan yang berkorelasi kuat dengan IPM. Adapun permasalahan utama pendidikan khususnya apabila berkaca pada program pendidikan inklusif yang terjadi saat ini ialah:

a. Pendidikan yang Belum Sepenuhnya Inklusif

Pendidikan inklusif yang menjadi program pemerintah belum terlaksana secara optimal. Salah satu contohnya adalah banyaknya orang kategori miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Menurut Idris dalam (Nurhada, 2022) meskipun sekolah digratiskan, namun banyak anak yang tidak atau putus sekolah karena terkendala ekonomi. Hal ini karena meskipun sekolah gratis, namun anak-anak harus mengeluarkan biaya untuk seragam, buku, perlengkapan dan uang saku. Disisi lain banyak anak putus sekolah karena ekonomi yang lemah sehingga memaksa mereka untuk bekerja dan putus sekolah. Kemudian permasalahan yang lain ialah sekolah luar biasa belum merata tersebar di Indonesia. Padahal penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus lainnya memiliki hak yang sama dengan anak normal dalam konsep pendidikan inklusif. Padahal seperti dijelaskan di awal, pendidikan inklusif tidak boleh ada diskriminasi. Padahal apabila mereka mendapatkan pendidikan kualitas SDM akan meningkat karena pendidikan yang merata ke seluruh individu.

b. Kualitas Guru yang Masih Dibawah Standar

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas guru di Indonesia tidak terlalu baik. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 masih terdapat sekitar 5% guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik guru yakni lulusan DIV atau SI. Kualitas guru tinggi masih berpusat pada kota besar di pulau Jawa, namun diluar itu kualitas guru masih timpang. Kualitas guru juga dipengaruhi oleh motivasi mengajar dari guru tersebut. Apabila motivasinya rendah, dapat berdampak pada kurang optimalnya pengajaran oleh guru yang juga berpengaruh pada prestasi siswa (Fatmasari, 2014). Kemudian motivasi guru dalam mengajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Gaji. Bahkan menurut (Haati, 2022) gaji guru berpengaruh langsung terhadap kinerja guru. Dalam penjelasannya, semakin rendah gaji guru akan semakin rendah kinerja guru dan begitupun sebaliknya.

c. Sarana dan Prasarana yang Belum Merata

Sarana dan Prasarana sekolah di Indonesia masih belum merata (Nurhada, 2022). Ketidakmerataan terjadi di daerah 3T baik dari segi sarana, prasarana atau bahkan tidak terdapat sekolah sama sekali. Hal tersebut membuat anak di daerah 3T sulit untuk mendapatkan akses pendidikan terlebih dengan kondisi ekonomi mereka yang dibawah rata-rata. Apabila beruntung dengan kondisi ekonomi yang stabil, biasanya anak akan disekolahkan ke kota yang terdapat fasilitas sekolah. Lebih lanjut apabila pun terdapat fasilitas sekolah, masih banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai. Contoh yang

paling umum ialah ruang kelas yang tidak layak (Radar Digital, 2023). Hal ini membuat pembelajaran tidak optimal sehingga pemahaman siswa kurang baik (Yustikia, 2017).

Masalah Penerimaan Perpajakan

Fokus utama dalam permasalahan ialah masalah penerimaan pajak. Dimana penerimaan pajak sebagai instrumen agar pendidikan Indonesia lebih baik dan sebagai salah satu komponen yang dapat menyelesaikan masalah pendidikan. Adapun permasalahan yang ada, antara lain:

a. Rendahnya *Tax Ratio*

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya *tax ratio* menjadi salah satu isu yang sedang hangat saat ini. *Tax ratio* Indonesia tahun 2023 mencapai 10,21%. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yakni 10,39%. Rendahnya *tax ratio* disebabkan oleh beberapa permasalahan perpajakan seperti banyaknya transaksi atau kegiatan ekonomi yang tidak terdeteksi fiscus. Padahal standar *tax ratio* yang ditetapkan oleh World Bank ialah sebesar 15% dari total PDB sebuah negara. Kemudian adanya masalah dari penggelapan dan penghindaran pajak. Apabila *tax ratio* dapat dioptimalkan tanpa adanya kebijakan fiskal yang menyebabkan penurunan PDB, maka akan menyebabkan *multiplier effect* seperti penurunan utang dan meningkatnya belanja pemerintah. Khususnya akan meningkatkan anggaran pendidikan.

b. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Menurut Dirjen Pajak, kepatuhan wajib pajak tahunan pada 2023 sebesar 88%. Angka ini termasuk tinggi namun belum optimal karena apabila diperhitungkan, margin 12% dapat meningkatkan penerimaan pajak. Masalah ini sebenarnya muncul dari wajib pajak itu sendiri, dimana dapat terjadi karena kurangnya rasa nasionalisme sehingga mereka merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap negara. Namun persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi DJP untuk dapat merangkul dan mengajak masyarakat agar patuh membayar pajak.

c. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Penggelapan pajak adalah aktivitas atau usaha secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan terhadap objek pajak. Penggelapan pajak yang umumnya dilakukan ialah tidak melampirkan data SPT secara jujur dan lengkap atau bahkan tidak melaporkan SPT tahunan. Hal ini jelas merugikan negara karena

penerimaan pajak yang seharusnya tidak terpenuhi. Penggelapan pajak juga merupakan tindak pidana dan dapat dihukum apabila terbukti.

d. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi dan atau menghapuskan utang pajak kepada pemerintah dengan cara-cara baik itu secara legal maupun ilegal. Dalam praktiknya di Indonesia, penghindaran pajak umumnya dilakukan secara legal sehingga sah secara hukum. Contoh siasat yang dilakukan oleh wajib badan ialah menerbitkan faktur fiktif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Faktur yang diterbitkan tidak nyata sehingga beban pajak berkurang dan merugikan negara. Bahkan praktik penghindaran pajak menjadi isu serius yang diangkat pada G20 India. Hal ini karena, praktik ini sangat merugikan negara dan menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio*.

Implikasi Solusi dan Kebijakan

Dalam permasalahan ini, masalah utama dan pertama yang harus diselesaikan adalah masalah penerimaan pajak. Dengan itu, penerimaan pajak dapat optimal dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Efeknya alokasi anggaran pendidikan meningkat dan masalah di sektor pendidikan dapat terselesaikan dengan adanya anggaran yang besar dan didukung *public policy* yang baik dan profesional. Oleh karena itu berdasarkan uraian masalah di atas terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai solusi masalah penerimaan pajak, yakni:

a. Edukasi dan Sosialisasi terhadap Wajib Pajak

Edukasi dan sosialisasi menjadi langkah preventif untuk menghindari permasalahan pajak yang lain. Edukasi kepada pelaku pajak baik itu wajib pajak maupun petugas pemungut pajak menjadi langkah yang harus terus dilakukan. Cost edukasi dan sosialisasi dapat dipangkas dengan menggunakan platform media sosial sehingga biaya kepatuhan lebih murah. Dengan pendekatan yang benar, edukasi dan sosialisasi akan berhasil dengan maksimal. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi dengan gencar, para wajib pajak dan juga masyarakat secara umum mendapat pengetahuan tentang pajak dan dapat membuang stigma negatif tentang pajak. Terlebih, pajak yang diberikan akan dinikmati oleh masyarakat. Beberapa penelitian seperti oleh (Wardani & Wati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.

b. Penegakan Hukum yang Adil

Penegakan hukum menjadi salah satu instrumen dalam menyelesaikan permasalahan pajak. Dengan adanya kepastian dan keadilan hukum, para pelaku yang secara ilegal mengurangi atau tidak membayar pajak dihukum secara adil. Sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi rasa takut kepada para oknum yang berniat akan melakukan hal yang sama. Kemudian apabila diperlukan, Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dapat diperkuat dengan memperhatikan isu terkini khususnya isu penghindaran pajak. Diharapkan, para pelaku dapat dijerat dengan hukum dan aturan yang telah diperlakukan.

c. Menggali Potensi Perpajakan

Potensi perpajakan di Indonesia sebenarnya masih sangat terbuka. Seorang Pakar pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Anggaran DPR RI menyatakan bahwa terdapat 40% potensi perpajakan yang belum digali. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak saat ini hanya 60% dari titik optimal. Terdapat sektor yang dapat digali untuk memaksimalkan potensi perpajakan yakni sektor konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Hal ini karena ketiga sektor tersebut berkontribusi besar bagi PDB Indonesia namun minim kontribusinya dalam penerimaan perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya reformasi perpajakan dengan melakukan studi terhadap potensi pengenaan pajak pada ketiga sektor tersebut. Sehingga paling tidak, penerimaan perpajakan Indonesia mendekati titik optimal. Potensi perpajakan lain ialah pada transaksi jual beli online. Transaksi jual beli online masih sulit terdeteksi sehingga pengenaan pajaknya belum optimal. Kemudian juga terdapat beberapa barang yang dapat dikenakan cukai. Hingga saat ini rencana cukai akan dikenakan pada minuman berpemanis. Hal ini merupakan langkah yang tepat. Selain itu cukai juga dapat dikenakan pada barang lain yang menimbulkan eksternalitas negatif seperti misal minuman bersoda dan sebagainya.

Apabila penerimaan perpajakan di Indonesia mulai meningkat dan menunjukkan tren menuju optimalisasi, maka anggaran untuk pendidikan terus meningkat. Oleh karena itu reformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan sehingga IPM Indonesia dapat meningkat. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan ialah:

a. Pemberian Beasiswa Tepat Sasaran

Pemberian beasiswa secara besar-besaran dapat dilakukan. Dalam hal ini beasiswa fokus diberikan untuk anak kurang mampu agar dapat terus bersekolah

bahkan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini tentunya harus tepat sasaran karena saat ini masih ditemui beasiswa seperti KIP dan KIP-K yang tidak tepat sasaran karena penentuan penerima beasiswa tersebut yang kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya standar untuk mendapatkan beasiswa kurang mampu. Beasiswa harus mengcover seluruh kebutuhan sekolah mulai dari pakaian, buku bahkan hingga uang bulanan. Sehingga tidak ada lagi isu tidak sekolah atau putus sekolah karena ekonomi.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Penambahan Sekolah

Pemenuhan sarana dan prasarana perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan kampus. Sehingga output siswa yang diberikan dapat berprestasi. Dengan itu, kualitas pendidikan terus meningkat. Kemudian perlu adanya penambahan sekolah dan juga perbaikan bagi sekolah di daerah 3T. Hal ini sebagai salah satu wujud pendidikan inklusif yakni pemerataan pendidikan dan tidak diskriminasi. Dengan begitu, anak-anak di daerah pedalaman mendapatkan akses pendidikan minimal 12 tahun. Outputnya adalah mereka dapat bersaing di dunia kerja dan mengurangi kemiskinan.

c. Peningkatan Gaji Tenaga Pengajar

Gaji kecil yang diterima oleh tenaga pengajar khususnya honorer menjadi isu hangat saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kualitas SDM bangsa kurang dihargai. Maka akan terasa wajar apabila pembelajaran kurang efektif karena motivasi mengajar guru yang terasa kurang. Oleh karena itu dengan anggaran yang lebih besar, maka guru honorer dapat diberikan gaji selayaknya. Baik itu dengan program pengangkatan menjadi ASN atau dengan menanggung gaji guru honorer oleh pemerintah diluar Biaya Operasional Sekolah (BOS).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerimaan perpajakan berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan penerimaan pajak yang tinggi, anggaran pendidikan akan meningkat sehingga reformasi pendidikan dapat dilakukan. Dengan pendidikan yang berkualitas, IPM Indonesia dapat terus meningkat. Oleh karena itu perlu adanya penyelesaian masalah perpajakan di Indonesia. Masalah perpajakan di Indonesia antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya tax ratio, penggelapan dan penghindaran pajak. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan alternatif solusi seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan, menggali potensi pajak, dan penegakkan hukum pajak yang adil. Selain itu

pendidikan inklusif masih sulit terwujud karena adanya beberapa masalah seperti banyaknya anak putus bahkan tidak sekolah, kualitas guru masih rendah, dan sarana dan prasarana yang belum merata. Oleh karena itu apabila penerimaan pajak optimal masalah tersebut dapat sedikit demi sedikit diselesaikan. Solusi yang ditawarkan antara lain pemberian beasiswa tepat sasaran, pemerataan sarana, prasarana dan penambahan sekolah serta meningkatkan gaji tenaga pengajar agar motivasi mengajar meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara*.
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(5), 117-125.
- BPS. (2023, Desember 7). *[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2022-2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-metode-baru--rata-rata-lama-sekolah.html>
- BPS. (2023, Desember 14). *Angka Melek Aksara Penduduk 15-24 Tahun Menurut Provinsi, 2021-2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ2MiMy/angka-melek-huruf-penduduk-umur-15-24-tahun-menurut-provinsi.html>
- BPS. (n.d.). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved from BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur: <https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Fatmasari. (2014). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kemampuan Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Gugus II SD Kecamatan Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 14(2), 426-441.
- Firmansyah, A., & Khairunnisa, D. (2023). Dampak Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Engineering Statistics and Data Science Journal*, 1(2).
- Haati, N. N. (2022). Pengaruh Gaji Guru dan Jam Kerja Guru terhadap Kinerja Guru di SMAN 1 Baturetno. *E-Prints UMS*. Retrieved from <https://eprints.ums.ac.id/105696/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Khoirunnisa, L., & Kusuma, I. G. (2024). Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer). *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 145-170. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2685>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurhada, H. (2022). National Education Problems: Factor and Solution Offered. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar*, 5(2), 127-137.

- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa, 1*, 117-128.
- Phytanza, D. T., Nur, R. A., Hasyim, Mappamono, A., Rahmi, Oualeng, . . . Rukmini, B. S. (2023). *Pendidikan Inklusif : Konsep, Implementasi, dan Tujuan*. Batam: CV. Rey Medika Grafika.
- Radar Digital. (2023, November 1). *Memprihatinkan, Kondisi Ruang Kelas Beberapa Sekolah Negeri di Jember Tak Layak Ditempati*. Retrieved from Radar Jember: <https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/793207399/memprihatinkan-kondisi-ruang-kelas-beberapa-sekolah-negeri-di-jember-tak-layak-ditempati>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic, 5*(4), 340-350.
- UNDP. (2023). *Human Development Index (HDI)*. Retrieved from Human Development Reports: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal, 7*(1), 34-54.
- Yustikia. (2017). Pentingnya Sarana Pendidikan Dalam Menunjang Kualitas Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Hindu, 4*(2), 2-11.